

# OBOR CHINA, AS DAN RESPON ULAMA INDONESIA

Herdi Sahrasad\*

Universitas Paramadina Jakarta, Indonesia

E-mail: sahrasad@yahoo.com

**Abstract:** The success of China's economic modernization surprised the international community. The 21st Century is the Asian Century that is hegemonized by China where there is no guarantee that China will consistently uphold "peaceful cooperation and coexistence" with neighboring countries in Southeast Asia. In 2050, half of the world's gross national product will be controlled by Asia which China is predicted to displace the US to second place and become the world's strongest player, followed by India in third place. Today, the world is witnessing: China which is authoritarian and rejects liberal democracy, continues to grow its military and economic power. The impact of China's military and economic growth is increasingly felt by developing countries in Southeast Asia. "The threat of China," a term that is often echoed by the US/West lately, is because China not only militarily great, but rather economically. Multaqa Ulama Ahlussunnah Waljamaah which was attended by thousands of Ulama, Habaib, Kyai, Caretakers of Islamic Boarding Schools throughout Indonesia who gathered at the Darussalam Boarding School in Wanaraja Garut, West Java on May 12, 2019 had expressed rejection of the People's Republic of China One Belt One Road program.

**Kata-kata Kunci:** hegemoni; *One Belt One Road* (OBOR); *the Yellow Peril*; Multaqa Ulama Ahlussunnah Waljamaah

## Pengantar

Mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono beberapa tahun silam menyampaikan pada penulis bahwa secara geografis, Indonesia adalah "sahabat" penting Amerika Serikat, terutama sebagai jangkar stabilitas di Asia Tenggara. Di mata Washington, Indonesia merupakan tumpuan atau jangkar keamanan dan stabilitas bagi kepentingan Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Hal ini tak terlepas dari posisi Indonesia yang terbentang di persimpangan antara jalur ekonomi, antara Jepang Korea dan China dengan jalur minyak dan gas ke Timur Tengah, sedangkan selat

Malaka, selat Sunda, selat Lombok, menjadi jalur yang penting untuk perdagangan mitra - mitra Amerika di sini, khususnya Jepang dan Korea.<sup>1</sup>

Peran Indonesia belakangan memang semakin penting terutama untuk mengimbangi kekuatan Cina, Rusia, Jepang dan India di kawasan. Juwono Sudarsono memandang, di masa depan Indonesia bisa menjadi penengah pertemuan kepentingan semua negara-negara besar tersebut di Asia Tenggara.

Sesungguhnya Indonesia bukanlah sekutu ekonomi terpenting Amerika. Posisi itu ditempati Singapura, yang menjadi pusat perdagangan, teknologi informasi dan perbankan. Praktis, selama bertahun-tahun, sebetulnya tak ada yang terlalu menonjol dalam hubungan Indonesia-Amerika. Dengan kata lain, relasi RI-AS mengesankan hubungan yang hangat tapi tidak terlalu erat.<sup>2</sup>

Kini, bagaimanakah sikap dan posisi Indonesia dalam merepson rivalitas AS dan China? Apakah Indonesia harus “mendayung lagi” di antara dua karang”, seperti yang dicanangkan dan diteguhkan oleh Proklamator Mohammad Hatta pada tahun 1948 ketika Perang Dingin pertama berlangsung? Kedua karang besar tersebut adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet (USSR). Sekarang mereka adalah AS dan China. Rusia bukan karang ketiga; kelemahan ekonominya menjadikannya sebagai kekuatan yang tidak memiliki spektrum yang kuat dan penuh.

Ada ketidakpercayaan yang merata di Asia Timur dan Tenggara atas RRC yang punya ambisi regional. Sehingga kawasan Asia ini menilai penting kehadiran militer AS sebagai penjaga stabilitas regional. Kasus Kep. Spratley tetap meyakinkan Asia Timur dan Tenggara tentang pentingnya payung keamanan dari AS. Jepang dan Korsel sudah meminta payung perlindungan AS menghadapi maneuver militer RRC.

Dengan langkah RRC sebagai kekuatan besar di Asia, ada perasaan tidak nyaman dari Jepang dan Korsel serta Negara-negara di Asia Tenggara, maka AS diharapkan mampu menjadi *counter balance force* atas naiknya penampilan militer RRC dan ekonomi Beijing di kawasan ini.<sup>3</sup> *Konferensi Tingkat Tinggi One Belt, One Road (KTT OBOR)* di *Beijing*, pada 14-15 Mei 2017 lalu menjadi bukti bagaimana China terus berusaha memperluas pengaruh ekonomi maupun politiknya di dunia. China berusaha memimpin Asia-Pasifik untuk menciptakan platform ekonomi terbesar di tingkat dunia.

Sinolog dan ahli sejarah China belumlah lupa bahwa lebih dari 2.000 tahun yang lalu, utusan kekaisaran China Zhang Qian membantu mendirikan Silk Road, jaringan rute perdagangan yang menghubungkan China dengan Asia Tengah dan dunia Arab. Nama itu berasal dari ekspor sutra China yang

paling penting. Dan jalan itu sendiri mempengaruhi perkembangan seluruh wilayah selama ratusan tahun. Pada 2013, presiden China, Xi Jinping, mengusulkan untuk membangun sesuatu yang ekuivalen dan modern, menciptakan jaringan perkeretaapian, jalan, jaringan pipa, dan jaringan utilitas yang menghubungkan Asia Cina, Asia Tengah, dan Asia Tenggara. Inisiatif ini, One Belt and One Road (OBOR), terdiri dari lebih dari sekedar hubungan fisik. Ini bertujuan untuk menciptakan platform kerjasama ekonomi terbesar di dunia, termasuk koordinasi kebijakan, kolaborasi perdagangan dan pendanaan, dan kerja sama sosial dan budaya. Melalui diskusi terbuka, OBOR bisa menciptakan manfaat bagi semua orang.<sup>4</sup>

Dewan Negara mengesahkan rencana aksi OBOR pada tahun 2015 dengan dua komponen utama: Sabuk Ekonomi Jalan Sutra dan Jalur Sutra Maritim Abad 21 (pameran). Sabuk Ekonomi Jalan Sutra dibayangkan sebagai tiga rute yang menghubungkan China ke Eropa (melalui Asia Tengah), Teluk Persia, Laut Tengah (melalui Asia Barat), dan Samudera Hindia (via Asia Selatan). Jalan Sutra Maritim Abad 21 direncanakan untuk menciptakan koneksi antar perairan regional. Lebih dari 60 negara, dengan PDB gabungan sebesar \$ 21 triliun, telah menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam rencana aksi OBOR. Tentu saja respon masyarakat dunia beraeneka ragam, dari yang konstruktif sampai yang curiga, syak wasangka dan membencinya.

Sinolog Wang Gungwu pernah berhujah bahwa politik domestik dan politik internasional Republik Rakyat China (RRC) pada hakekatnya adalah satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan sebagai negara yang sedang bangkit, baik secara ekonomi maupun militer, China diyakini tak akan memicu konflik lebih besar di masa mendatang. Dalam hal ini, pembangunan kekuatan maritim China sekalipun, harus dilihat dalam konteks pertahanan negara itu, yang sudah tidak membangun kekuatan lautnya selama lima abad terakhir.<sup>5</sup>

Menurut Wang Gungwu, banyak pihak cenderung melihat persoalan hanya dari sudut pandang AS, yang tidak mau China menjadi naga raksasa yang menyaingi kedigdayaanya di Asia dan percaturan dunia, meskipun secara obyektif China tumbuh sebagai kekuatan adikuasa, terutama terkait respon Barack Obama dalam konteks kebijakan "Pivot Asia" AS dan "American First" ala Presiden Donald Trump.

Dengan KTT OBOR ini, raksasa China berusaha keras menghidupkan kembali "jalur sutra" dan menyiapkan program infrastruktur terbesar di dunia untuk menghubungkan Asia dan Eropa. Proyek tersebut diperkirakan akan menelan biaya sebesar US\$1 triliun atau bahkan lebih.

Media melaporkan China ingin menciptakan kembali “Jalur Sutra” seperti halnya Marco Polo yang menghubungkan Eropa dan Asia. Tapi bukan jalur yang dilalui ‘unta atau karavan’ untuk mengangkut rempah-rempah dan sutra ratusan tahun yang lalu, melainkan China yang berambisi membangun jalur raksasa yang merupakan jaringan perdagangan modern senilai US\$ 1,4 triliun.<sup>6</sup>

Sebenarnya, Presiden China Xi Jinping sudah meluncurkan inisiatif “One Belt, One Road” (OBOR), agenda raksasa yang lebih dikenal sebagai “Jalur Sutra Baru” pada musim gugur tahun 2013. Tujuannya adalah untuk meningkatkan konektivitas antara Asia, Eropa dan Afrika dengan membangun jaringan transportasi dan infrastruktur fisik lainnya seperti jalan, kereta api, pelabuhan laut dan jaringan pipa di berbagai negara di sepanjang rute “Jalur Sutra” kuno.

Impian China adalah proyek tersebut diharapkan dapat memfasilitasi peningkatan perdagangan antara China dan negara-negara sepanjang rute tersebut. Hal itu juga bisa menarik mereka lebih dekat ke Beijing, walaupun tidak jadi sekutu China. Para analis memperkirakan proyek tersebut bakal menggeser pusat perekonomian global dan terkesan menantang tatanan dunia yang saat ini masih dipimpin oleh Amerika Serikat (AS).

Dalam kaitan China dan AS ini, Mahaguru Studi Internasional Universitas Stanford, AS Donald K. Emmerson (2018) menyarankan agar Indonesia jeli dan waspada sebab: *Pertama*, AS sedang mengalami krisis politik yang dipicu oleh salah satu presiden paling kurang jujur dan paling egois dalam sejarah Amerika. Nasionalisme populisnya sungguh kejam, regresif dan mendestabilisasi.

*Kedua*, China yang otoriter, dibawah pimpinan presiden yang semakin represif (Xi Jinping), telah melakukan praktik "diplomasi jebakan utang" "debt-trap diplomacy" sementara secara bertahap mencaplok Laut Cina Selatan. Perilaku pemimpin kedua negara adikuasa itu terkesan tidak menguntungkan bagi Indonesia.

*“As for authoritarian China, its increasingly repressive president has thrown off term limits and practices “debt-trap diplomacy” while incrementally annexing the South China Sea (Sedangkan untuk China yang otoriter, presidennya yang semakin represif telah membuang batasan masa jabatan dan mempraktikkan “diplomasi perangkap utang” sementara secara bertahap mencaplok Laut Cina Selatan.)”* ungkap Don Emmerson.<sup>7</sup>

Sementara itu, Indonesia setiap tahun kecolongan 20 miliar dollar AS dari berbagai kegiatan ilegal, seperti pencurian ikan, pembalakan liar, perompakan, dan penyelundupan. TNI dan Polri tidak sanggup mencegah

semua ini karena aparat negara yang namanya polisi dan tentara tidak punya kemampuan efektif untuk mencegah penyusupan, penerobosan kapal ikan, nelayan asing, apalagi kapal canggih dari Amerika, China, Australia, dan Jepang.

Dalam hal ini, menarik pandangan Juwono Sudarsono bahwa di balik kemajuan dan kemonceran RRC, masalah-masalah yang dihadapi China saat ini, meskipun dalam skala yang lebih kecil, adalah peringatan bagi pasar-pasar berkembang lainnya, termasuk: Rusia, Brasil, Meksiko, Nigeria, India, Pakistan, Afrika Selatan, Indonesia, Vietnam dan Bangladesh. China (RRC) sebagai negara bangsa, sebagai peradaban, sebetulnya dikepung oleh AS/Barat. Tetapi kehadiran China di laut China Selatan tidak bakal dihormati oleh Amerika. China merasa dikepung oleh Jepang, India kemudian negara ASEAN. Sekarang RRC mulai merasa kebesarannya diuji coba oleh dunia. Sebagai peradaban besar, China sampai sekarang masih belum diakui sehingga menjadi keresahan tersendiri bagi Beijing dewasa ini.

Pertumbuhan ekonomi China mungkin baik untuk kelas menengahnya, tetapi tidak untuk kelas bawah yang terlupakan. Dalam kasus China, masalah ekonomi politik yang paling menantang adalah indeks koefisien Gini yang melebar, yang telah meningkat dari 0,32 menjadi 0,45 dalam ketidaksetaraan pendapatan, sama dengan Amerika Serikat kontemporer, masyarakat yang paling tidak setara di "negara maju". Dalam lintasan yang berbeda, China dan AS masing-masing harus mengatasi perbedaan yang sangat parah dalam dunia perbankan dan keuangan. Keberhasilan atau kegagalan mereka dalam menghadapi kenyataan ini, akan memutuskan negara mana yang tetap menjadi "top dog" pada tahun 2030.

Hemat penulis, untuk mengimbangi RRC (China) yang berpraktik "diplomasi jebakan utang" (*debt-trap diplomacy*) sembari secara bertahap mencaplok kawasan Laut Cina Selatan, maka Amerika Serikat (AS) tidak perlu hadir secara berlebihan di Pasifik Barat, hingga menimbulkan persoalan dalam negeri masing-masing negara di kawasan tersebut terkait kebijakan pertahanan luar negeri, misalnya, melalui *Proliferation Security Initiative* (PSI). Indonesia dapat memahami AS yang meluncurkan *Proliferation Security Initiative* (PSI), pasca aksi teror *Black September* pada 2001. Seperti diketahui, ketentuan dalam PSI menyebutkan, AS berhak melakukan pencegahan terhadap setiap kapal, atau alat transportasi yang melewati Asia Tenggara dan Indonesia, yang diduga membawa senjata pemusnah massal. Hal itu jelas-jelas melanggar prinsip kedaulatan Indonesia.

Dalam hal ini, Amerika sebaiknya berperan dalam peningkatan kemampuan (*capacity building*) masing-masing negara, untuk menggelar pasukan, kapal dan pesawat hingga pengamanan dan keamanan kawasan

terpelihara tanpa harus diikuti kehadiran AS. Namun, AS harus menghormati dan memahami kedaulatan negara-negara lain, khususnya Pasifik Barat dan Asia Tenggara. Demikian halnya China, yang di mata Indonesia dan ASEAN, jelas tidak elok kalau memaksakan kehendak untuk menguasai Laut China Selatan dengan cara sedemikian rupa.

Bagaimana pun sebagai negara besar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia (bersama ASEAN) tetap ingin memiliki ruang kedaulatan meski terbatas, hingga dapat menentukan nasibnya sendiri tanpa tekanan dari pihak asing. Jakarta menyadari bahwa kekuatan politik, ekonomi dan militer AS dan China tidak bakal dapat dilawan secara terang-terangan, tetapi secara politik diplomatik, diharapkan bisa diajak berdialog dan mencapai titik temu berdasar politik bebas aktif, sehingga paling tidak, Indonesia tetap memiliki ruang kedaulatan sendiri.

### **Pertumbuhan Militer China dan Dampaknya**

China telah mengumumkan kenaikan anggaran belanja militer 2018 hingga 8,1 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dan anggaran pertahanan 2018 akan menjadi 1,11 triliun yuan atau setara Rp2500 triliun. Anggaran besar itu diperlukan untuk terus memodernisasi program militer ambisius di tengah meningkatnya kekhawatiran keamanan negara itu. China akan terus mengembangkan berbagai kemampuan militer baru, termasuk jet tempur siluman, kapal induk dan rudal anti-satelit. Perdana Menteri Cina, Li Keqiang, menegaskan dalam pidato di sesi pembukaan parlemen pada Senin, 5 Maret 2018, bahwa negaranya akan memajukan semua aspek pelatihan militer dan kesiap-siagaan perang, dan dengan tegas dan tegas melindungi kepentingan kedaulatan, keamanan, dan pembangunan nasional. Kurangnya transparansi di Beijing terkait kenaikan anggaran militernya, telah menambah ketegangan regional di Asia.

Tahun 2016, anggaran pertahanan China diperkirakan mencapai 954,35 miliar yuan atau setara 138,40 miliar dollar AS. Adapun pada tahun 2017 diperkirakan anggaran pertahanan China mencapai 1,02 triliun yuan.

Tahun 2017 lalu, Presiden AS Donald Trump bertekad untuk meningkatkan biaya pertahanan sebesar 10 persen dalam anggaran yang diusulkan untuk tahun 2018. Alasan AS, pembangunan militer China -- dan proyeksi kekuatan lautnya -- telah menyebabkan kekhawatiran di kawasan, di mana Tiongkok belakangan mengambil sikap yang semakin tegas dalam sengketa teritorial. Beijing telah membangun pulau buatan di terumbu karang di perairan Laut China Selatan, yang juga diklaim oleh negara lain.

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), dalam laporan April 2016 menyingkapkan bahwa, anggaran militer China meroket hingga 132 persen selama periode 10 tahun, 2006-2015. Dan kenaikan signifikan ini disebabkan karena konflik yang sedang dihadapi negeri Tirai Bambu itu di Laut China Selatan. Menurut studi Robyn Meredith dalam *The Elephant and the Dragon* (Quacana, 2008) hingga 2025, China akan memiliki sumberdaya pertahanan sebanding dengan yang digunakan militer AS kini. Hal itu bisa dilihat dari anggaran pertahanan yang dikeluarkan pemerintah Cina.

Sebagai salah satu negara importir senjata terbesar dunia, China tercatat naik dua peringkat ke posisi ke-3 sepanjang 2014. Anggaran pembelian senjata negara tersebut masih terus tumbuh dengan laju yang sangat cepat. anggaran pertahanan nasional China meningkat dua kali lipat sejak 2008. Pemerintah Beijing mengumumkan anggaran pertahanannya meningkat 10,1 persen menjadi 886,9 milyar yuan atau Rp 1.835,6 triliun (kurs: Rp 2.101/yuan) untuk 2015.

Pada awal 2006, misalnya, menurut informasi Cina telah mengeluarkan anggaran sebesar 35 miliar dolar Amerika atau sekitar Rp 560 triliun yang dialokasikan untuk membangun angkatan bersenjata. Pada tahun 2008 Cina menganggarkan 121,9 miliar dolar (Rp 1219 triliun; 8,28 % APBN), dibandingkan dengan Indonesia yang hanya menganggarkan 3,6 miliar dolar (Rp 36 triliun; 0,24% APBN) pada tahun yang sama.

Sejauh ini, China tengah dihadapi masalah sengketa dua wilayah, yakni Laut China Selatan (konflik dengan Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam) serta Laut China Timur (konflik dengan Jepang). Selain itu, niatan Taiwan untuk merdeka, menambah andil atas kenaikan anggaran militer China. Tambahan belanja pertahanan ini sebagai bagian dari kebijakan Presiden Xi Jinping atas meningkatnya ketegangan di kawasan yang menjadi ancaman nyata di masa depan. Dibandingkan Amerika Serikat pada periode yang sama, anggaran militer AS menurun empat persen.

Tahun 2015, anggaran militer China sebesar US\$215 miliar, atau satu tingkat di bawah Amerika Serikat yang menggelontorkan dananya hingga US\$596 miliar. Sedangkan pada urutan ketiga dan keempat, masing-masing ditempati Arab Saudi (US\$87,2 miliar) dan Rusia (US\$66,4 miliar).

Secara keseluruhan, berdasarkan laporan SIPRI, pada 2015 belanja militer dunia mencapai US\$1,67 triliun, meningkat satu persen dari tahun sebelumnya. China meningkatkan belanja militer sebesar 7,6% tahun ini menjadi 954,35 miliar yuan (US\$146,67 miliar), demikian pengumuman pemerintah Indonesia pada Sabtu, 5 Maret 2016. Tahun 2014, anggaran

pertahanan RRC dianggarkan naik 10,1% menjadi 886,90 miliar yuan. Dalam hal ini, juru bicara parlemen China mengatakan kenaikan pada 2016 menjadi sekitar 7% --8%. (US\$1 = 6,5066 yuan renminbi China) dan ini pelambatan pertumbuhan. Perlambatan tersebut merupakan yang terendah sejak 2010, saat anggaran militer China hanya naik 7,5%.

Dibandingkan China, maka AS tetap jadi negara dengan militer terboros di seluruh dunia. Militer AS menghabiskan empat kali lebih banyak dari saingannya, militer China. Angka yang dikeluarkan oleh Global Firepower (GFP) menegaskan bahwa belanja militer AS pada tahun 2015 adalah yang tertinggi, yakni US\$581 juta, diikuti oleh militer China USD155 juta. RAND Corporation melaporkan, konflik AS dan China akan berdampak besar pada biaya politik dan ekonomi. RAND mengakui perang kemungkinan tidak terjadi untuk menghindari kerusakan ekonomi dan politik.

Menyoal Laut China Selatan, AS ingin membendung pengaruh RRC di Asia Tenggara khususnya dalam persoalan Laut China Selatan. Wilayah ini amat strategis bagi AS maupun RRC, baik sebagai jalur perdagangan maupun sumberdaya alamnya yang berlimpah. Oleh karena itu AS terus menjalin hubungan dengan sekutu-sekutunya, termasuk Indonesia, untuk mengeliminir pengaruh China. Wilayah Laut China Selatan memang menjadi rebutan banyak negara. Letaknya yang strategis sebagai jalur perdagangan dunia akan menghasilkan keuntungan bagi negara yang menguasainya. Selain itu kandungan kekayaan sumber daya hayati dan mineral yang terkandung di dalamnya juga menjadi pemicu sengketa. Para ilmuwan meyakini dasar laut di perairan tersebut mengandung minyak, gas dan mineral. Negara mana pun yang menguasai Laut China Selatan dapat memanfaatkan sumber daya tersebut untuk kesejahteraan negara.

Laut China Selatan juga merupakan area potensial untuk penangkapan ikan, yang dapat menyokong kebutuhan pangan yang kian meningkat di negara-negara Asia. Namun nilai utama dari Laut China Selatan adalah posisinya yang strategis. Kapal-kapal dari sektor perdagangan dengan nilai lebih dari US\$ 5 triliun per tahun melewati Laut China Selatan. Komoditas perdagangan tersebut meliputi material mentah, produk jadi dan minyak dalam jumlah besar.

Beijing menganggap Laut China Selatan sebagai halaman belakang mereka sendiri, sebuah perairan bebas di mana angkatan lautnya dapat berlayar tanpa gangguan apapun. Pengadilan Arbitrase Internasional (PCA) menyatakan sembilan garis putus atau nine-dashed line di Laut China Selatan tidak berdasar, sehingga Tiongkok tidak berhak mengklaim sumber daya yang ada di sana. Putusan PCA merupakan kemenangan besar bagi Filipina,

yang melayangkan gugatan terkait klaim Tiongkok ke PCA pada 2013. Pengadilan yang berada di Den Haag itu juga menyatakan bahwa pulau-pulau artifisial tak berpenghuni yang dibangun Tiongkok di Laut China Selatan tidak memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut. Putusan PCA semakin memperkecil luas area yang diklaim Tiongkok. PCA juga menyebut Tiongkok telah banyak melanggar hukum dan merusak ekosistem Laut China Selatan.

### **AS vs China?**

Amerika Serikat dan China sama-sama mengincar Laut China Selatan (LCS) dan Selat Malaka. Malaka memang selat paling sibuk setelah Hormuz. Dan peningkatan pelayaran merupakan keniscayaan seiring gegap dinamika baik kebutuhan maupun kepentingan pribadi, kelompok dan juga bangsa-bangsa di dunia. Zhao Yuncheng, ilmuwan dari China's Institute of Contemporary International Relation: *"Whoever controls the Straits of Malacca and the Indian Ocean could threaten China's oil supply route."*

Masuk akal jika tempo hari Presiden China Hu Jiantao menegaskan, "Malacca-Dilemma" merupakan persoalan kunci untuk jaminan pasokan energi mengingat 80% impor minyak Cina melewati Selat Malaka, oleh karena itu keamanan jalur di "selat basah" ini menjadi urgen bagi kelanjutan ekonomi Negeri Paman Mao. Maka China pun menerapkan konsep String of Pearls. Yaitu strategi Cina dalam rangka mengamankan suplai energi.

Strategi String of Pearls ini mempunyai konsekuensi dibutuhkannya militer modern yang progresif, juga memerlukan akses lapangan terbang dan pelabuhan-pelabuhan. Target jalur yang diincar ialah bentangan perairan dari pesisir Laut China Selatan, Selat Malaka, melintasi Samudera Hindia, Laut Arab dan Teluk Persia. Sehingga kalau kita gambarkan dalam peta, terlihat mirip untaian mutiara atau gambar kalung, Pearls.<sup>8</sup>

Kondisi ini diprediksi bisa meningkatkan "suhu" konflik terbuka AS versus China di kawasan Asia Pasifik, utamanya Asia Tenggara. Karena AS pun sudah merekomendasikan hal ini lewat Council of Foreign Relations (CFR) pada 2002, dan bahkan sudah digodok secara lebih matang lewat beberapa think tank di Washington. Sehingga kemudian dirumuskan sebagai dasar kebijakan luar negeri Presiden George W Bush yang kemudian kita kenal sebagai Project New American Century (PNAC). Pihak perancang kebijakan strategis Keamanan Nasional di Washington tentunya mencermati dengan seksama strategi String of Pearls tersebut.

Dalam hal ini, implementasi String of Pearls memang tergantung fasilitas militer yang memadai di Pulau Hainan; landasan terbang darurat di

Pulau Woody, Kepulauan Paracel, jaraknya sekitar 300 mil dari laut timur Vietnam; kontainer fasilitas pengiriman di Chittagong, Bangladesh; pembangunan pelabuhan air dalam di Sittwe, Myanmar; pembangunan basis angkatan laut di Gwadar, Pakistan; pipa melalui Islamabad dan Karakoram Highway ke Kashgar di Xinjiang; fasilitas pengumpulan intelijen di pulau-pulau di Teluk Benggala dekat Selat Malaka dan pelabuhan Hambantota di Sri Lanka, dan lainnya.

Dalam beberapa kasus, AS memberi subsidi pembangunan pelabuhan baru dan fasilitas lapangan udara di negara-negara target dengan kompensasi fasilitas dibuat sesuai standar China. Sehubungan dengan tarik-menarik pengaruh antara AS dan China ini, menarik mencermati pengamatan dan prediksi akademisi Jean Paul Rodrigue. Menurut Rodrigue, jalur transportasi minyak dan gas untuk kebutuhan energi di Asia Timur selain melalui Selat Malaka, juga melintas di Selat Sunda, Selat Lombok dan lainnya. Tak boleh dipungkiri, ketiganya merupakan selat vital bagi negara-negara Asia Timur, khususnya Cina dan Jepang.

Dalam pandangan Rodrigue, jika terjadi hambatan pelayaran di Selat Malaka maka alternatif jalur paling singkat adalah Selat Sunda. Inilah sisi paling krusial dari wilayah seputar Laut China Selatan dan Selat Malaka dalam beberapa tahun ke depan. China sudah mengisyaratkan bahwa hambatan utama implementasi Strategi String of Pearls adalah bercokolnya kapal-kapal perang AS dan sekutu di Singapura.<sup>9</sup>

Semakin menegangnya hubungan politik antara AS vs China, niscaya memiliki implikasi negatif atas hilir-mudik pelayaran Cina di Selat Malaka. Shock and awe pun telah ditebar, melalui janji mengirim kapal tempur pesisir (LCS) USS Freedom di Selat Singapura, ungkap Laksamana Thomas Rowden. USS Freedom ialah kapal perang jenis terbaru AS, memiliki kecepatan hingga lebih 40 knot serta handal untuk perang di lautan dekat pesisir, mampu menyapu ranjau laut dan menyerang kapal selam. Dari sudut pandang strategis kepentingan nasional China di Laut Cina Selatan, implementasi String of Pearls akan terkendala kalau kelak memuncak friksi antara AS dan China karena penerapan strategi di atas mutlak melalui rute Selat Malaka.

### **Kontroversi OBOR China dan Indonesia**

Di tengah terjadinya penindasan, persekusi dan penghinaan kepada Muslim Uighur di Xinjiang (RRC), proyek OBOR China diyakini banyak kalangan bakal memberikan kerugian bagi Indonesia. Dari 28 kerja sama antara Indonesia dan China dalam kerangka tersebut, nilainya mencapai

US\$91 miliar, atau lebih dari Rp 1.288 triliun. OBOR dianggap menjadi visi geoekonomis China paling ambisius dengan melibatkan 65 negara, dan melingkupi 70% populasi dunia. Konsep ini akan menelan investasi mendekati US \$4 milyar, termasuk \$900 juta yang telah diumumkan China.

China telah menyiapkan diri untuk menguasai jalur darat dan maritim bagi kepentingan ekonominya. Ada 5 tujuan yang ingin diraih China dalam Inisiasi OBOR, yaitu koordinasi kebijakan, konektivitas fasilitas, perdagangan tanpa hambatan, integrasi keuangan, dan ikatan masyarakat (*people to people bond*). Dalam merealisasikan inisiasi ini, di jalur darat, China menggagas infrastruktur jalan kereta, dan jalan raya, yang memanjang untuk menghubungkan China hingga menuju Eropa.

Sedangkan untuk jalur maritim, China menggagas pembangunan sejumlah pelabuhan internasional, dan tol laut, sebagai sarana lalu lintas logistik dan zona penyimpanan untuk perusahaan-perusahaan China di kawasan tersebut. China berambisi membangun berbagai infrastruktur baik darat, maupun pelabuhan laut maupun bandara udara di penjuru dunia, termasuk Indonesia.

Dalam perspektif politik dan motif ekonomi itulah, Indonesia termasuk lintasan Sealane of Communications (SLOCs) yakni jalur perdagangan dunia yang tak pernah sepi yang terletak di antara dua benua dan dua samudera, yang sangat strategis bagi China. Sebanyak 23 Memorandum of Understanding (MoU) terkait proyek OBOR/BRI diteken antara sejumlah pebisnis Indonesia dan China dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) II Belt Road Initiative (BRI) di Beijing pada 27 April 2019 silam. Penandatanganan kerja sama yang disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan itu berpotensi memperlemah kedaulatan ekonomi dan politik RI. Proyek OBOR China dengan Indonesia itu menjadi kontroversi dan dalam sorotan tajam masyarakat, ulama maupun kalangan civil society yang menyadari akan hegemoni bahaya kuning, bahaya China. Indonesia adalah negara yang sangat melimpah kekayaannya, dan Indonesia menjadi bagian dari negara dunia yang dilintasi proyek OBOR (*One Belt One Road*) China. Proyek ambisius dengan dana prestisius menjadikan China ingin meraih tampuk kepemimpinan dunia melalui hegemoni politik dan ekonomi.

China adalah raksa komunis yang telah berevolusi dengan memadukan ekonomi sosialisme dan kapitalisme untuk membangun dirinya menjadi kekuatan adikuasa. Bersaing dengan Amerika Serikat dan sekutunya, kehadiran China juga menjadi ancaman AS dalam menggosok pengaruhnya di arena global. Sejauh ini, pemerintah Jokowi akan menyetujui proyek OBOR yang diinisiasi oleh China. Proyek ini bagi China untuk

mempermudah koneksi dagang antar-negara di Eropa dan Asia melalui jalur sutra maritim.

Sebelumnya dalam pertemuan Global Maritime Fulcrum Belt And Road Initiatives (GMF BRI), China sudah menawarkan rancangan Framework Agreement untuk bekerja sama di Kuala Tanjung, Sumatera Utara (Sumut) sebagai proyek tahap pertama. Dilanjutkan proyek di Kawasan Industri Sei Mangkei dan kerjasama strategis pada Bandara Internasional Kualanamu, pengembangan energi bersih di kawasan Sungai Kayan, Kalimantan Utara, pengembangan kawasan ekonomi eksklusif di Bitung, Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Kura-Kura *Island* di Bali.

Pelbagai jajak pendapat mengungkapkan kekhawatiran warga ASEAN tentang ambisi geostrategis China di Asia Tenggara. Hanya satu dari 10 orang yang melihat China sebagai negara yang ramah dan baik hati. Hampir setengahnya menilai China berniat menancapkan pengaruhnya di ASEAN.

Harus dipahami OBOR telah menjadi pondasi bagi pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, dalam membuat kebijakan luar negeri sejak dia menjadi Ketua Partai Komunis China (PKC) pada tahun 2013. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing telah menginvestasikan ratusan miliar dolar, dan telah meminta untuk mengerahkan hingga 5 triliun, proyek energi, transportasi, dan pelabuhan kemitraan dengan sejumlah negara selama lima tahun ke depan.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai pemerintah Republik Indonesia tidak konsisten dalam proyek *One Belt One Road* (OBOR) —atau yang lebih anyar disebut *Belt and Road Initiative* (BRI) yang bekerja sama dengan pemerintah Republik Rakyat China. Inkonsistensi tersebut terlihat dari masih adanya 4 proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menggunakan batu bara yang pemerintah tawarkan kepada China untuk dibiayai dari total 28 proyek strategis. Padahal menurut Menko Kemaritiman luhut B Panjaitan, proyek yang dibangun harus ramah lingkungan tanpa terkecuali. Namun keempat proyek PLTU yang ditawarkan pemerintah kepada China antara lain PLTU Tanah Kuning-Mangkupadi di Kalimantan Utara, dua PLTU Mulut Tambang di Kalimantan Selatan dan Tenggara, serta PLTU Ekspansi Celukan Bawang Bali 2, semua itu tidak ramah lingkungan.

Menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, setidaknya ada tiga alasan kenapa perjanjian-perjanjian itu tak pantas dilakukan dan perlu ditinjau ulang.<sup>10</sup> Pertama, sebutnya, hampir semua yang disebut sektor swasta di China pasti berafiliasi dengan BUMN ataupun pemerintah RRC. Sehingga, dalih perjanjian yang diteken skemanya "*Business to Business*" (*B to B*), bukan "*Government to Government*" (*G to G*), dengan sendirinya jadi mentah.

Kedua, proyek itu terkait dengan soal geopolitik dan geostrategis yang tak bisa digampangkan sebagai semata urusan bisnis dan investasi. Perjanjian semacam itu mestinya mendapatkan supervisi dari Pemerintah dan dikonsultasikan pada DPR, karena ada soal politik, pertahanan dan keamanan yang perlu dikaji di dalamnya. Bahwa, sesuai Pasal 10 UU No. 24/2000, setiap perjanjian internasional yang menyangkut enam bidang, yaitu (a) politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara, (b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara, (c) kedaulatan atau hak berdaulat negara, d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup, (e) pembentukan kaidah hukum baru, serta (f) pinjaman dan atau hibah luar negeri, semuanya wajib mendapatkan persetujuan parlemen.

Apalagi sesudah ada Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018, seluruh perjanjian internasional harus diinventarisasi terlebih dulu oleh Pemerintah bersama dengan parlemen untuk kemudian didapatkan kesepakatan bidang mana yang mesti disahkan melalui UU atau Perpres. Jadi, menurut Fadli Zon dalam kultwitnya di Twitter, perjanjian-perjanjian yang terkait dengan OBOR atau BRI tak boleh dilepas begitu saja seolah itu adalah persoalan swasta. Sebab, ada isu geopolitik, geostrategi dan isu pertahanan keamanan di dalamnya.

Alasan ketiga, dewasa ini Indonesia sedang berada pada periode transisi kekuasaan dalam siklus lima tahunan. Sangat tak pantas hal-hal terkait isu strategis seperti OBOR atau BRI diputuskan di masa akhir kekuasaan semacam ini. Sebagai catatan, selain Srilanka dan Djibouti, saat ini ada delapan negara yang telah terlilit jebakan utang China, yaitu Pakistan, Maladewa, Montenegro, Laos, Mongolia, Kyrgyzstan, dan Tajikistan. Sejauh ini Pakistan adalah korban jebakan utang yang paling parah. Negara tersebut terikat perjanjian China-Pakistan Economic Corridor senilai US\$ 62 miliar, atau sekitar Rp 900 triliun. Pemerintah China mengambil 80 persen dari seluruh proyek yang sebagian besar berupa proyek pembangkit listrik tersebut.

Dalam kaitan ini, analis independen M Rizal Fadillah mencatat bahwa Multaqo Ulama Ahlussunnah Waljamaah (Aswaja) yang dihadiri ribuan Ulama, Habaib, Kyai, Pengasuh Pondok Pesantren se-Indonesia yang berkumpul di Pondok Pesantren Darussalam Wanaraja Garut Jawa Barat tanggal 12 Mei 2019 telah menyatakan penolakan pada program Republik Rakyat China *One Belt One Road* (OBOR) atau *Belt and Road Initiative* (BRI). Para Ulama ini melihat bahaya dari program China yang direspons hangat dan ditindak lanjuti Pemerintah Indonesia. Dikhawatirkan Indonesia disadari atau tidak akan menjadi jajahan China. Demikian juga bahaya

komunisme dapat mengancam. Bukti sejarah dahulu Komunis berkhianat pada negara dan membantai para Ulama.<sup>11</sup>

Para tokoh agama Islam berkumpul guna membahas persoalan krusial, yaitu kerja sama Indonesia-China dalam proyek OBOR. Berdasarkan pengamatan, beberapa ulama, kiai, habaib, serta pimpinan Ponpes yang hadir dari Jatim, Jateng, Jabarn dan DKI serta Banten antara lain: Habib Kholilullah Abu Bakar Al Habsyi, Pengasuh Mahad Ratibul Hadad, Jakarta Timur, KH Dr Fahmi Lukman, Ulama Aswaja Bandung, Jabar, KH Sakhro Wardi, KH Tatang Muchtar, KH Ali Bayanullah, KH Dr Nawawi, KH Anda Yasin, KH Yasin Munthaha, dan masih banyak lagi lainnya.

Para ulama memandang, proyek OBOR tersebut hanya membuat Indonesia buntung dan negeri ini akan menjadi jajahan baru bagi China. Peserta Multaqa juga khawatir dengan ancaman ideologi komunis yang pernah menjadikan umat Islam sebagai sasaran pembantaian di masa lalu akan terulang kembali. Apalagi penandatanganan kerja sama ini tampaknya dipaksakan, di saat hiruk pikuk proses Pemilu 2019 yang belum kelar dengan berbagai temuan dan laporan kecurangan. Oleh karena itu, Multaqa Ulama sepakat menolak kerja sama Indonesia-China lewat proyek OBOR ini.

Analisis di Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Zulfikar Rakhmat mengatakan, pemerintah China sangat fokus terhadap investasi melalui One Belt one Road (OBOR) di Indonesia. Pasalnya, China memposisikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan posisi yang sangat strategis. Dan tanpa melalui jalur maritim Indonesia maka jalur sutra China akan terputus. Karena itu, China memiliki kepentingan untuk menjadikan Indonesia sebagai jembatan menghubungkan proyek jalur sutranya. China memberikan signal memperdalam kerja sama ke Indonesia bukan karena perang dagang saja tapi karena OBOR sendiri. Kalau kita lihat peta OBOR Indonesia punya posisi strategis. Karena tanpa peran Indonesia di situ melalui jalur maritimnya OBOR China tidak akan pernah tercapai dan putus tanpa peran Indonesia di dalamnya.<sup>12</sup>

Dalam kaitan ini, sungguh jeli kewaspadaan para Ulama Aswaja terhadap bahaya program OBOR di berbagai belahan dunia. Semangat hegemoni Cina sangat kuat. Investasi dan hutang adalah “jalan sutera baru” untuk melakukan kolonialisasi. Ekonomi dan politik tak bisa dipisahkan. Indonesia menurut para Ulama khawatir justru menjadi pihak yang dirugikan sedangkan China sangat diuntungkan dengan kerjasama yang diinisiasinya ini.

Program OBOR pada umumnya adalah proyek “turn key” sehingga China sangat dominan. Dana, materil dan mesin, tenaga ahli, hingga tenaga

kerja didatangkan dari China. Yang bahaya adalah masuknya ribuan bahkan bisa jutaan tenaga kerja legal dan ilegal ke Indonesia. Hal ini bisa menjadi misi migrasi terselubung. Menyusul sudah bermukimnya WNI keturunan China yang berhasil “menguasai” berbagai sektor ekonomi penting di Indonesia. Program ambisius PM Xi Jinping yang menekankan “kerjasama” tenaga kerja ini dibenarkan dan dikuatkan oleh Wakil PM Liu Yandong ketika berpidato di kampus UI pada Mei tahun 2015 lalu.

China memang merajalela dan bahaya. Sektor bisnis penting telah dipegang. Konglomerasi dibangun oleh para pengusaha etnis China. Semua tahu negeri ini seolah telah dikendalikan para taipan. Proteksi bagi pribumi dalam dunia usaha tidak signifikan. Bahkan kini peran WNI keturunan ini sudah mulai bereskalasi pada pengisian dan pengaruh sektor politik. Apa yang dikhawatirkan para Ulama memang sangat beralasan. Jika sudah masuk ruang politik maka aspek ideologi akan ikut mendompleng. Komunisme mendapatkan ruang untuk pengembangan. Sejarah masa lalu memberi pelajaran akan kejahatan PKI yang menyusup dan memberi pengaruh kuat pada pemegang kekuasaan politik.

Konferensi Partai Komunis China di Beijing telah menekankan program strategis “kebangkitan dan penguatan urusan China perantauan”. Menggerakkan dan mengoptimalkan potensi etnis China diberbagai belahan dunia. Untuk kepentingan negara leluhur mereka, RRC. Secara tidak langsung juga menjadikan warga yang berada di perantauan itu sebagai agen-agen ideologi. Ekspor ideologi komunisme adalah misi penting di samping keuntungan ekonomi untuk menyējahterakan negara leluhur. Slogan yang dipropagandakan adalah “All Patriots are One Family”. Mereka yang di perantauan adalah keluarga dan mereka harus jadi patriot untuk negara China.<sup>13</sup>

Program OBOR adalah irisan atau “cantolan” kepentingan di atas. Inilah yang seharusnya diwaspadai Pemerintah. Sayang Pemerintahan Jokowi justru menjalankan program berbahaya ini dengan riang gembira. Menko Maritim Luhut Panjaitan berwajah garang memelototi yang tak setuju dengan kebijakan ini. Akhirnya kita menilai wajar jika ada sebagian rakyat Indonesia mencurigai rezim “symbiosis” Indonesia-China. Pemerintahan Jokowi tidak peka pada aspirasi masyarakat. Sepertinya masa bodoh dan berprinsip “Anjing menggonggong Kafilah berlalu.” Seharusnya suara Ulama pun didengar dengan seksama. Ada kekhawatiran akan bahaya yang sedang mengancam di depan

Seharusnya dengan posisi yang cukup strategis tersebut, pemerintah harus mampu mengambil manfaat dan keuntungan dari posisi strategisnya dan jangan sampai pemerintah hanya terlalu fokus memanfaatkan peluang

dan melupakan resiko dan bahaya yang mungkin terjadi karena mengikuti oportunitas dari kerja sama OBOR China tersebut.

Ribuan ulama, kiai, habaib, dan pengasuh pondok pesantren se-Indonesia menolak proyek One Belt One Road (OBOR) -lebih anyar disebut Belt and Road Initiative (BRI)- yang baru saja ditandatangani pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Republik Rakyat China. Para tokoh agama tersebut memantapkan keputusannya lewat Multaqa Ulama Ahlussunnah Waljamaah (Aswaja). Multaqa ulama menilai proyek OBOR akan membuat Indonesia buntung dan justru merugikan rakyat.

Pinjaman (investasi asing) yang diberikan China, diikat dengan berbagai syarat seperti adanya jaminan dalam bentuk aset, adanya imbal hasil seperti ekspor komoditas tertentu ke China hingga kewajiban negara pengutang agar pengadaan peralatan dan jasa teknis harus diimpor dari China. Mengutip riset yang diterbitkan oleh Rand Corporation, China's Foreign Aid and Government Sponsored Investment Activities, disebutkan bahwa utang yang diberikan oleh China mensyaratkan minimal 50 persen dari pinjaman tersebut terkait dengan pembelian barang dari China. Jadi sangat jelas bahwa bagi Indonesia, proyek OBOR China ini membawa skema investasi asing, utang luar negeri, dan penjajahan gaya baru bagi negeri ini. Semuanya itu jelas-jelas merugikan Indonesia dan menguntungkan China. Sehingga kita umat Islam harus menolak proyek OBOR ini.

Dalam kaitan ini, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon melalui kritiknya terhadap proyek One Belt One Road (OBOR), menyebut OBOR/Belt and Road Initiative (BRI) bernilai tambah hanya menguntungkan China. Ada beberapa alasan kenapa nota-nota kesepahaman itu perlu ditinjau kembali dan diberi supervisi oleh Pemerintah.

Pertama, meski disebut kerja sama "*Business to Business*" (*B to B*), bukan "*Government to Government*" (*G to G*), namun kerja sama ini tidaklah gratis. Proyek-proyek tersebut mensyaratkan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan China, juga menggunakan alat-alat, barang-barang serta tenaga kerja dari China. Nilai tambah kerja sama ini hanya menguntungkan China.<sup>14</sup>

Kedua, adanya potensi jebakan utang (*debt trap policy*) yang kemudian terkonversi jadi penguasaan sumber daya. Bercermin dari pengalaman Srilanka, atau Djibouti di Afrika Timur, proyek-proyek infrastruktur yang gagal bayar pada akhirnya jatuh ke penguasaan China. Indonesia tentu tak ingin kawasan-kawasan strategis atau infrastruktur-infrastruktur strategis yang sedang kita bangun nantinya dikuasai asing (RRC).

Penolakan dan koreksi perjanjian dagang dengan China juga telah dilakukan pemerintah Malaysia di bawah Perdana Menteri Mahathir

Mohammad. Mereka berhasil merevisi perjanjian terkait proyek pembangunan jaringan kereta api pantai timur (ECRL) yang dianggap merugikan kepentingan nasional Malaysia yang sebelumnya telah diteken oleh pemerintahan Najib Razak yang korup dan penuh skandal itu.

Pada masa pemerintahan PM Najib Razak, proyek kereta api tersebut diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp 225 triliun. Sesudah diancam akan dibatalkan oleh Mahathir, nilai investasi proyek itu bisa dipangkas tinggal Rp 151 triliun saja.<sup>15</sup>

Kita berharap Pemerintah (Indonesia) juga berani memberikan tekanan serupa kepada China, bukannya membiarkan kepentingan kita yang ditekan oleh China. Bagaimanapun, proyek OBOR pertama-tama mewakili kepentingan China yang berambisi membangun jalur sutera baru di abad ke-21, baik di jalur darat, maupun maritim. Meskipun kemudian istilah OBOR telah diperhalus menjadi BRI, karena telah memancing reaksi serius di negara-negara Barat. Kita perlu mempertimbangkan semua perspektif mengenai hal ini. Apalagi, kita punya pengalaman tak menyenangkan dengan model kerjasama Turnkey Project yang memberi karpet merah bagi pekerja kasar China masuk ke Indonesia

WALHI menilai, pemerintah tidak punya sensitivitas terhadap lingkungan hidup dan perubahan iklim. Selain menawarkan proyek PLTU yang menghasilkan energi kotor hasil pembakaran batu bara, pemerintah juga menawarkan sejumlah proyek energi bersih seperti PLTA. Berdasarkan advokasi yang dilakukan Walhi, masih banyak proyek yang dibangun tidak melalui proses pengkajian analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang benar.

Dalam hal ini, Koordinator Kampanye Walhi Edo Rahman mengatakan pemerintah mengaku keterlibatannya dalam proyek BRI hanya sebatas pada studi kelayakan dan penyusunan Amdal. Kemudian untuk proyek-proyek yang dikerjasamakan menggunakan skema Business to Business (BtoB) antara perusahaan Indonesia dan perusahaan China. Walhi banyak menemukan proses pembuatan Amdal dan studi kelayakan yang dilakukan tidak secara profesional karena dianggap tidak penting. Proses pembuatan Amdal sampai terbit izin lingkungan ada yang menggunakan pemalsuan tandatangan ahli, dan proses pembuatan Amdal dan studi kelayakan tidak bisa dilakukan sembarangan karena mengejar waktu, sehingga mengabaikan kualitas.

Sebagaimana diketahui, China menandatangani kontrak proyek-proyek baru senilai USD 64 miliar atau hampir senilai Rp 908 ribu triliun, dalam skema *Belt and Road Initiative* (BRI) -dulu dikenal sebagai *One Belt One Road*

(OBOR). Kerja sama itu disepakati dalam *Belt and Road Forum* di Beijing, yang dihadiri 37 kepala negara dan berakhir pada Sabtu 27 April 2019. Kesepakatan kerja sama itu diteken langsung oleh Presiden China, Xi Jinping, dengan negara-negara mitra dalam BRI. Kesepakatan ini merupakan proyek tahap lanjutan OBOR. Dalam forum itu, kehadiran Indonesia diwakili oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). JK melawat ke Beijing, didampingi Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Pandjaitan dan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Di mata Luhut Panjaitan, proyek OBOR/*Belt and Road Initiative* telah menjadi alternatif untuk mendukung proyek-proyek pembangunan. Menurutnya ini menunjukkan bahwa China, sebagai aktor utama, mampu menanggapi kebutuhan masyarakat internasional.<sup>16</sup>

“Indonesia mengalokasikan empat koridor untuk proyek BRI. Yakni di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Pulau Bali,” kata Luhut. Menurut Luhut, jumlah total populasi keempat provinsi ini di atas 30 juta orang. Kecuali untuk Bali, ketiga provinsi ini memiliki angka kemiskinan sekitar 7-9 persen. Sehingga kata Luhut, proyek-proyek BRI harus berkontribusi dalam pengurangan tingkat kemiskinan di ketiga provinsi tersebut.

## Penutup

Keberhasilan modernisasi ekonomi China memang mengejutkan masyarakat dunia. Namun menurut Dani Rodrik, seorang pakar di AS, citra China sebagai raksasa dunia dengan kombinasi ekspor dan strategi diversifikasi ekonomi maupun inovasi institusi, bukanlah gambaran yang tanpa persoalan. Bahkan gambaran itu tidak semuanya indah.<sup>17</sup>

Oleh sebab itu, tatkala Abad ke-21 adalah Abad Asia yang dihegemoni China dan sejauh ini didominasi oleh China, tidak ada jaminan China konsisten menegakkan “peaceful cooperation & coexistence” dengan negara tetangga di Asia Tenggara. China sudah membangun basis militer di kawasan Natuna, Laut China Selatan dan ada kecenderungan untuk melanggar “code of conduct” yang disepakati bersama dalam upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan, para Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN mengeluarkan ASEAN Declaration on the South China Sea yang ditandatangani di Manila tanggal 22 Juli 1992. Laut China Selatan merupakan wilayah strategis yang berbatasan dengan Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan RRC.

Di beberapa bagian terjadi tumpang tindih yurisdiksi antara claimant states (Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan RRC) yang menjadikan potensi konflik di wilayah ini cukup tinggi. Adapun prinsip-

prinsip yang dimuat dalam deklarasi ini, antara lain, menekankan perlunya penyelesaian sengketa secara damai, dan mendorong dilakukannya eksplorasi kerja sama terkait dengan *safety of maritime navigation and communication*; perlindungan atas lingkungan laut; koordinasi *search and rescue*; upaya memerangi pembajakan di laut dan perampokan bersenjata serta perdagangan gelap obat-obatan.

Beijing sudah melihat, pada 2050 separuh lebih produk nasional bruto dunia bakal dikuasai Asia di mana China diprediksi bakal menggeser AS ke urutan kedua dan akan menjadi pemain terkuat dunia, diikuti India di posisi ketiga. Dewasa ini dunia menyaksikan: China yang otoriter dan menolak demokrasi liberal, terus tumbuh kekuatan militer dan ekonominya, meski para analis memprediksi, bukan berarti pertumbuhan RRC itu akan demikian selamanya. Sampai sekarang ini, dampak pertumbuhan militer dan ekonomi China makin terasa bagi negara-negara berkembang di Asia Tenggara. “Ancaman China”, suatu istilah yang sering digaungkan AS/Barat, akhir-akhir ini bukanlah karena semata China yang hebat secara militer, melainkan justru secara ekonomi. Situasi-kondisi ini harus menjadi renungan, pemikiran dan pertimbangan strategis bagi para pemimpin Indonesia dan ASEAN mengenai hegemoni/dominasi bahaya Kuning (*the Yellow Peril*) di masa sekarang dan mendatang.

### Catatan Kaki

\* Associate Director The Media Institute & Paramadina Institute for Ethics & Civilizations Universitas Paramadina, Centre for Strategic Studies (CSS-UI), University of Indonesia dan Departemen Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Terimakasih untuk Prof Mai Dar, Prof Harry Poeze, Lutfi Adam MA (kandidat PhD, History, Northwestern University, AS), Teuku Syahrul Ansari SH MH (PhD cand), Dr Asnawi Latif dan Dubes Prof Mulyawan Hadad PhD yang menerima kami selama “my research days” untuk program visiting scholar tahun 2018 ke Universitas Leiden, Belanda, Brussels Belgia, Paris, Marburg Jerman and Geneva, Swiss.

<sup>1</sup> Herdi Sabrasad, *Asia Tenggara: Kuasa dan Kepemimpinan*, (Indonesian Edition). Published by CreateSpace Independent Publishing Platform, Amazon, 2013

<sup>2</sup> *Sebagai bandingan, lihat Herdi Sabrasad, China, Indonesia, dan ASEAN Suatu Tinjauan*, Journal of Integrative International Relations UIN Sunan Ampel, <http://jurnal.fisip.uinsby.ac.id/index.php/JIIR/article/view/47>

<sup>3</sup> Gregory G. Holyk, “Paper Tiger? Chinese Soft Power in East Asia”, *Political Science Quarterly*, Vol.126, Number 2, Summer, 2011

<sup>4</sup> Tian Jinchun , ‘One Belt and One Road’: Connecting China and the world <https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/one-belt-and-one-road-connecting-china-and-the-world>.<sup>1</sup> Lihat juga, Juwono Sudarsono Sebut China Takkan Berani Menyerang Indonesia, <http://riaugreen.com/view/Dunia/16756/Juwono-Sudarsono-Sebut-China-Takkan-Berani-Menyerang-Indonesia.html#.XQCRxKIxWM8>

<sup>5</sup> Sebagai bandingan, lihat Wang Gungwu, *The Chinese Way: China's Position in International Relations*, Oslo: Scandinavian University Press (Norwegian Nobel Institute Lecture Series No.3), 1995.

<sup>6</sup> Ratusan abad yang lalu, orang-orang China bermigrasi, bergerak ke arah “Laut Selatan” (Nanyang) mengacu pada daerah-daerah di kawasan Laut Cina Selatan, yang dicapai oleh orang-orang Cina melalui jalur pelayaran. Daerah-daerah yang dimaksud ialah wilayah pantai dari dataran Asia Tenggara serta sebagian besar kepulauan Filipina dan Indonesia. Wang Gungwu, *Community and Nation: China, Southeast Asia and Australia*, Allen & Unwin Pty, Ltd. 1992.

<sup>7</sup> Donald K. Emmerson, Indonesian foreign policy: Between two reefs again?, *The Jakarta Post*, opinion, October 19, 2018

<sup>8</sup> M. Arief Pranoto, *Global Future Institute*, 2017

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Fadli Zon lewat kultwitnya Senin (13/05/2019). <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2019/04/29/164013/walhi-pemerintah-tak-konsisten-pada-proyek-obor-dengan-china.html>

<sup>11</sup> Forum yang juga dihadiri muhibbin dari seluruh Indonesia ini digelar di Pondok Pesantren Darussalm, Wanaraaja, Garut, Jawa Barat, Ahad (12/05/2019) 7 Ramadhan 1440H.

<sup>12</sup> Akurat.news (26/5/2019).

<sup>13</sup> M Rizal Fadillah, Ulama Tolak obor, <https://telusur.co.id/2019/06/ulama-tolak-obor/> diakses 5/6/19 pukul 22.00

<sup>14</sup> Fadli Zon lewat kultwitnya Senin (13/05/2019).

<sup>15</sup> <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2019/05/13/164742/kritisi-obor-fadli-zon-nilai-tambahnya-hanya-menguntungkan-china.html>. diakses 4/6/19 pukul 22.00

<sup>16</sup> <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2019/04/29/164013/walhi-pemerintah-tak-konsisten-pada-proyek-obor-dengan-china.html> diakses 6/6/19 pukul 22.00

<sup>17</sup> Dani Rodrik , *The Globalization Paradox, Democracy and The Future of the World Economy*, W. W. Norton & Co, 2011. p. 346

## Daftar Referensi

- Emmerson, Donald K. Indonesian foreign policy: Between two reefs again?, *The Jakarta Post*, opinion, October 19, 2018
- Holyk, Gregory G. “Paper Tiger? Chinese Soft Power in East Asia”, *Political Science Quarterly*, Vol.126, Number 2, Summer, 2011

- “Kritisi OBOR Fadli Zon: Nilai Tambahnya Hanya Menguntungkan China,” *Hidayatullah.com*,  
<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2019/05/13/164742/kritisi-obor-fadli-zon-nilai-tambahnya-hanya-menguntungkan-china.html>.
- Tian Jinchun , ‘One Belt and One Road’: Connecting China and the world  
<https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/one-belt-and-one-road-connecting-china-and-the-world>
- “WALHI: Pemerintah Tak Konsisten pada Proyek OBOR,”  
*Hidayatullah.com*,  
<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2019/04/29/164013/walhi-pemerintah-tak-konsisten-pada-proyek-obor-dengan-china.html>
- Wang Gungwu, *The Chinese Way: China's Position in International Relations*, Oslo: Scandinavian University Press (Norwegian Nobel Institute Lecture Series No.3), 1995.
- Wang Gungwu, *Community and Nation: China, Southeast Asia and Australia*, Allen & Unwin Pty, Ltd. 1992.
- Zon, Fadli. *Kultwit*. Senin (13/05/2019).